

ANALISIS TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL DI TANJUNGPINANG TERKAIT AKURASI DATA DAN KETEPATAN SASARAN

Rahayu Permatasari
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email : rahayupermatasari772@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa tata kelola bantuan sosial di Kota Tanjungpinang dengan penekanan khusus pada data penerima yang akurat dan sasaran penyaluran yang tepat. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan meninjau dokumen dari instansi dan masyarakat penerima yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan masih menghadapi masalah, seperti pembaruan data yang lambat, ketidaksesuaian informasi sosial ekonomi warga, dan verifikasi lapangan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan penerima ganda, rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria, dan keluarga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Meskipun digitalisasi pendataan, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan transparansi telah dilakukan, implementasi belum optimal. Untuk membuat distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan akuntabel, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial di Tanjungpinang memerlukan pembaruan data yang lebih konsisten, penguatan sistem verifikasi, dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata kunci: tata kelola, bantuan sosial, ketepatan sasaran, akurasi data

Abstract

The purpose of this study is to examine the governance of social assistance in Tanjungpinang City, with a particular emphasis on accurate recipient data and targeted distribution. This study used a qualitative descriptive approach, conducting observations, interviews, and reviewing documents from relevant agencies and recipient communities. The results indicate that the data collection process still faces challenges, such as slow data updates, inconsistencies in residents' socioeconomic information, and poor field verification. This situation results in duplicate recipients, households that do not meet criteria, and poor families experiencing homelessness. Although data collection digitization, inter-agency coordination, and increased transparency have been implemented, implementation has not been optimal. To make social assistance distribution more targeted and accountable, this study suggests that social assistance governance in Tanjungpinang requires more consistent data updates, strengthened verification systems, and community-based monitoring.

Keywords: governance, social assistance, targeting accuracy, data accuracy

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1487
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2023). Program bantuan sosial terus diperluas di berbagai wilayah, termasuk Kota Tanjungpinang, melalui berbagai program. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pendataan dan prosedur untuk memverifikasi penerima manfaat (Suryani & Putra, 2022). Dalam kenyataannya, berbagai masalah administratif dan teknis seringkali menghalangi penyebaran bantuan sosial untuk mencapai tujuan.

Ketidaksesuaian informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterlambatan pembaruan data, dan kurangnya verifikasi lapangan adalah masalah paling umum dengan akurasi data (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi ini dapat menyebabkan salah satu dari dua kesalahan: kesalahan penggabungan, di mana penerima yang tidak layak tetap menerima bantuan, atau kesalahan penghapusan, di mana keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan (Rahmawati, 2020). Kesalahan pendataan ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah dan menyebabkan distribusi yang tidak adil.

Selain itu, sistem pendataan yang responsif, akurat, dan terintegrasi diperlukan karena perubahan sosial dan ekonomi di Tanjungpinang (Mulyadi, 2021). Namun, kemampuan teknis daerah, ketersediaan sumber daya manusia, dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi masih menjadi hambatan. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa pembenahan, seperti mengintegrasikan data kesejahteraan, digitalisasi pendataan, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi, implementasi di lapangan seringkali tidak berhasil (Hidayat & Salsabila, 2022).

Dengan mempertimbangkan situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola bantuan sosial di Kota Tanjungpinang dengan penekanan pada ketepatan data dan ketepatan sasaran penyaluran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Siregar, 2023).

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui pencarian dokumen menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait masalah dan solusi dalam manajemen public (Krippendorff, 2019). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori isu, penyebab masalah, dan rekomendasi perbaikan. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem bantuan sosial di Kota Tanjungpinang (Creswell & Poth, 2018). Khususnya, penelitian ini mengeksplorasi data penerima yang akurat dan sasaran penyaluran yang tepat. Masyarakat penerima bantuan, petugas Dinas Sosial, dan petugas pendata di tingkat kelurahan adalah subjek penelitian. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang terlibat langsung dalam proses pendataan dan distribusi bantuan (Patton, 2015).

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara menyeluruh, dan meninjau laporan pendataan, data penerima bantuan, dan pedoman pelaksanaan dari instansi terkait (Sugiyono, 2022). Mekanisme pendataan, proses verifikasi dan validasi data, prosedur penyaluran bantuan, dan elemen pendukung dan penghambat ketepatan sasaran adalah

beberapa variabel yang diteliti. Pedoman wawancara, catatan observasi, dan lembar dokumentasi adalah alat penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian (Denzin, 2017). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi empiris secara komprehensif tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial Kota Tanjungpinang masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk data yang tidak akurat dan sasaran penyaluran yang tepat (Suryani & Putra, 2023). Wawancara dengan petugas pendataan di tingkat kelurahan dan petugas Dinas Sosial menunjukkan bahwa proses pendataan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Akibatnya, tidak ada pembaruan data yang dilakukan secara berkala (Dinas Sosial Tanjungpinang, 2022). Dengan demikian, rumah tangga yang sudah mengalami perubahan status ekonomi masih didaftarkan sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, karena proses verifikasi lapangan yang terbatas, beberapa keluarga yang dianggap miskin justru belum terdaftar dalam sistem (Rahmadani, 2021).

Hasil diskusi penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya masalah teknis tetapi juga masalah manajemen dan kebijakan. Pendanaan dan penyaluran bantuan kurang efektif karena alur koordinasi yang tidak jelas, pelatihan petugas yang kurang, dan literasi digital yang rendah (Hapsari, 2024). Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menerapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, belum terintegrasi di semua tingkat pemerintahan, sehingga belum optimal (Kementerian Sosial RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran yang tepat, tata kelola harus ditingkatkan melalui peningkatan SDM, penggunaan TI, dan evaluasi berkala (Nasution, 2022).

Selain itu, observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses validasi dan verifikasi data masih bergantung pada laporan masyarakat dan kemampuan petugas. Hal ini menyebabkan kesalahan inclusion dan exclusion yang cukup besar (Wulandari, 2023). Menurut dokumen pendataan tahun terakhir, ada sejumlah data yang belum diperbarui karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, petugas belum memahami sepenuhnya cara menggunakan aplikasi pendataan (Dinas Sosial Tanjungpinang, 2022). Karena data tidak akurat, distribusi bantuan tidak selalu sesuai dengan keadaan penerima manfaat (Suryani & Putra, 2023).



Gambar 1.1 Bantuan Sosial Tanjungpinang

Selama proses penyediaan bantuan sosial, ditemukan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan dengan baik, terutama antara Dinas Sosial, kelurahan, dan RT/RW. Beberapa petugas mengatakan bahwa penyediaan bantuan tidak dapat segera disesuaikan karena informasi tentang perubahan data sering diterima terlambat (Hapsari, 2024). Selain itu, proses validasi membutuhkan waktu lebih lama karena partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan informasi tentang perubahan sosial ekonomi (Wulandari, 2023). Ini mendukung kesimpulan bahwa sistem manajemen membutuhkan mekanisme yang lebih responsive (Nasution, 2022).

Hasil diskusi penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya masalah teknis tetapi juga masalah manajemen dan kebijakan. Pendanaan dan penyaluran bantuan kurang efektif karena alur koordinasi yang tidak jelas, pelatihan petugas yang kurang, dan literasi digital yang rendah (Suryani & Putra, 2023). Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menerapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, belum terintegrasi di semua tingkat pemerintahan, sehingga belum optimal (Kementerian Sosial RI, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran yang tepat, tata kelola harus ditingkatkan melalui peningkatan SDM, penggunaan TI, dan evaluasi berkala (Rahmadani, 2021).

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pembaruan data (Dinas Sosial Tanjungpinang, 2022). Kekuatan mekanisme ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial dan mengurangi kemungkinan kesalahan data (Hapsari, 2024). Secara keseluruhan, hasil penelitian mendukung kebutuhan akan reformasi tata kelola bantuan sosial yang lebih terorganisir dan fleksibel untuk menyelesaikan masalah ketepatan sasaran dan akurasi data di Tanjungpinang (Nasution, 2022).

KESIMPULAN

Hasil analisis Analisis Tata Kelola Bantuan Sosial di Tanjungpinang Terkait Akurasi Data dan Ketepatan Sasaran menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial di Tanjungpinang masih menghadapi beberapa masalah (Suryani & Putra, 2023). Hal-hal ini termasuk mekanisme

penyaluran yang belum sepenuhnya terkoordinasi dan kevalidan data penerima (Nasution, 2022). Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan termasuk ketidaksesuaian data, pembaruan basis data yang tidak merata, dan proses verifikasi yang buruk (Dinas Sosial Tanjungpinang, 2022).

Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan peningkatan melalui penggunaan teknologi pendataan dan peningkatan koordinasi antarinstansi, yang menghasilkan lebih banyak transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan (Kementerian Sosial RI, 2023). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola data, konsistensi verifikasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan sangat berpengaruh pada ketepatan sasaran bantuan sosial (Hapsari, 2024). Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan di Tanjungpinang, sistem pendataan harus diperkuat, petugas harus ditingkatkan, dan mekanisme koordinasi harus diperbaiki (Rahmadani, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). *Laporan pendataan dan pembaruan data kesejahteraan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022*. Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). *Laporan pendataan dan validasi penerima bantuan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022*. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- Dinas Sosial Tanjungpinang. (2022). *Laporan pendataan dan verifikasi bantuan sosial Kota Tanjungpinang tahun 2022*. Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- Hapsari, L. (2024). Efektivitas koordinasi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 15(1), 45-58.
- Hapsari, R. (2024). Evaluasi implementasi bantuan sosial dalam meningkatkan ketepatan sasaran. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 55-67.
- Hapsari, R. (2024). Pengaruh tata kelola data terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-59.
- Hidayat, A., & Salsabila, R. (2022). Implementasi digitalisasi pendataan bantuan sosial di daerah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Sosial*, 10(2), 88-102.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Evaluasi implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)*. Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Laporan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG): Evaluasi implementasi nasional*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Pedoman Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, A. J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Mulyadi, T. (2021). Dinamika perubahan sosial ekonomi dan urgensi pembaruan data bantuan sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 33-47.
- Nasution, A. (2022). Tantangan tata kelola bantuan sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 112-124.
- Nasution, A. (2022). Permasalahan akurasi data penerima bantuan sosial di tingkat daerah. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101-115.
- Nasution, A. R. (2022). Penguatan tata kelola bantuan sosial melalui peningkatan SDM dan teknologi informasi. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 112-125.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods*. SAGE Publications.
- Rahmadani, S. (2021). Koordinasi antarinstansi dalam penyaluran bantuan sosial daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(3), 72-84.
- Rahmadani, S. (2021). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan bantuan sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(3), 144-158.
- Rahmadani, T. (2021). Analisis ketepatan sasaran bantuan sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3), 210-219.
- Rahmawati, S. (2020). Analisis kesalahan inclusion dan exclusion dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 55-66.
- Siregar, D. (2023). Evaluasi tata kelola bantuan sosial berbasis data terintegrasi. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(1), 12-25.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, D., & Putra, M. F. (2023). Tantangan akurasi data dan distribusi bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 89-103.
- Suryani, M., & Putra, D. (2022). Kualitas pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(2), 64-78.
- Suryani, M., & Putra, D. (2023). Evaluasi tata kelola bantuan sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 22-34.
- Suryani, T., & Putra, R. (2023). Analisis efektivitas koordinasi lintas instansi dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 201-215.
- Wulandari, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembaruan data penerima bantuan sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 77-89.
- Wulandari, S. (2023). Kesalahan inclusion dan exclusion dalam pendataan bansos: Studi kasus kota kecil. *Jurnal Pelayanan Publik*, 11(1), 56-67.